

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Didasari pada hasil dan pembahasan analisis variabel bebas yaitu TP, UMR, INV, PDRB, dan JUU terhadap PTK pada 10 Provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2022 diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tingkat Pendidikan (TP) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan TP akan menyebabkan kenaikan pula pada PTK di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan setiap tamatan jenjang pendidikan antara SMP-Universitas mempengaruhi bagaimana tenaga kerja itu sendiri dapat masuk ke lapangan pekerjaan sehingga sejalan dengan teori *human capital* dan Keynes.
2. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa UMR belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap PTK di Pulau Sumatera diakibatkan karena Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan lapangan pekerjaan yang terbatas dan persaingan yang ketat membuat para pemilik usaha menekan biaya produksi termasuk biaya tenaga kerja sehingga tidak sejalan dengan teori Keynes.
3. Investasi (INV) berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan INV akan meningkatkan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan realisasi atas investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dari daya beli konsumen atas suatu barang dan jasa, serta sejalan dengan teori yang Keynes.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sehingga tidak sejalan dengan *Okun's Law* dan pendapat Keynes. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB menyebabkan penurunan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan PDRB yang tinggi tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas

serta ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memenuhi kebutuhan kualitas pelayanan, serta tingkat ruralisasi di Pulau Sumatera.

5. Jumlah Unit Usaha (JUJ) berpengaruh signifikan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK). Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan JUJ menyebabkan penurunan PTK di Pulau Sumatera dikarenakan kebanyakan usaha bergerak meningkatkan mesin dan teknologi sebagai persaingan kualitas produksinya sehingga dilakukan pengurangan tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera sehingga sejalan dengan teori Schumpeter.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama, sebaiknya variabel bebasnya ditambahkan atau diubah untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih kuat apa saja yang kemungkinan dapat menunjukkan adanya pengaruh secara langsung terhadap PTK.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang dengan objek penelitian yang lebih luas sehingga tidak hanya terfokus pada beberapa wilayah tertentu dalam melakukan penelitian dan memberikan pengaruh yang lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memberikan perbandingan wilayah atau negara sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan baru di wilayah yang masih rendah terhadap PTK.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak literatur berkaitan dengan variabel yang digunakan dan penggunaan aplikasi olah data yang terbaru dalam penelitian.

V.2.2 Saran Praktis

a) Bagi Pemerintah

1. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi PTK di Pulau Sumatera dengan menyediakan lapangan kerja baru maupun meningkatkan lapangan pekerjaan yang sudah ada agar seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja dan masalah tenaga kerja dapat segera teratasi.

2. Pemerintah diharapkan meningkatkan TP agar SDM di Pulau Sumatera dapat memiliki kualitas dan keterampilan sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar dengan kebijakan program bantuan pendidikan yang merata dan sesuai kebutuhan, serta kewajiban menempuh hingga Diploma.
3. Pemerintah perlu memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan produktivitas dengan menyempurnakan kebijakan dan implementasi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, serta juga pemerintah dapat menyeimbangkan pendapatan minimum dengan harga konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam membangun pembangunan perekonomian yang berkelanjutan,
4. Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan dalam UU Cipta Kerja yang sudah berganti beberapa kali dan terakhir menjadi UU No. 6 Tahun 2023 pada awal tahun kemarin, namun melihat catatan yang dihasilkan dengan UU tersebut perlu adanya pengembangan yang terus dilanjutkan untuk menggunakan tenaga kerja secara menyeluruh dan sejahtera seperti memasukkan formula KHL dalam perhitungan upah.

b) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh Tingkat Pendidikan (TP), Upah Minimum Regional (UMR), Investasi (INV), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Unit Usaha (JUU) di 10 Provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2022, serta masyarakat mampu mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan PTK di Pulau Sumatera.